

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Evada Dewata^{1*)}, Hadi Jauhari²⁾, Misfi El Auda³⁾

^{1*)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya; korespondensi email: evada78@polsri.ac.id

²⁾Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya; email: ha.di@polsri.ac.id

³⁾Alumni Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya; email: misfielauda98@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini mendapatkan bukti empiris berupa pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimediasi Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sampel penelitian berjumlah 96 orang pada OPD di Kabupaten Musi Banyuasin. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan diperoleh 79 data kuesioner yang bisa diolah menggunakan teknik analisis regresi dan analisis jalur (path analysis). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kualitas Laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel intervening.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sistem, Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan.

Abstract

The purpose of this study is to obtain empirical evidence in the form of the influence of the Government's Internal Control System, Local Government Accounting System on Regional Financial Management Accountability mediated by the Quality of Financial Reports in Regional Apparatus Organizations, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province. Until the study, there were 96 people in OPD in Musi Banyuasin Regency. Primary data were collected through questionnaires and obtained 79 questionnaire data which can be processed using regression analysis techniques and path analysis. The findings of this study indicate that the Government's Internal Control System has a significant positive effect on the Quality of Financial Reports. The Regional Financial Accounting System does not have a significant effect on the Quality of Financial Reports. The quality of financial statements has a positive and significant effect on the Accountability of Financial Statements Management, the Government's Internal Control System has a significant positive effect on the Accountability of Financial Statements Management, the Regional Financial Accounting System has a significant positive effect on the Accountability of Financial Statements Management and the Government's Internal Control System has a positive effect on the Accountability of Regional Financial Management through the Quality of Financial Statements as an intervening variable.

Keyword: Government Internal Control System, Regional Government Accounting, Financial Report Quality, Financial Report Management Accountability.

1.PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 disebutkan bahwa informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dibandingkan. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik (Wicaksono,2015). Akuntabilitas menyiratkan pemerintah sudah memaksimalkan pengelolaan dana publik sesuai standar dan aturan (Mahmudi, 2016). Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan dapat terlaksana jika sistem pengendalian intern pemerintah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan artinya sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mansyuer & Efendi,2020; Sabriani & Rahayu,2020; Hardiningsih dkk,2019). Namun berbeda pendapat dengan Sari (2020) bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Akuntabilitas juga dapat terlaksana jika ada praktik sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, seperti diungkap Superdi (2017) dan Suprihastini, dkk (2017), adanya tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, disamping itu perlu diterapkan ketaatan dalam menerapkan sistem akuntansi pelaporan di lingkungan instansi pemerintah (Dewata dkk (2020).

Kualitas laporan keuangan sendiri diduga dipengaruhi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, menurut Warren et al (2005) salah satu tujuan sistem pengendalian intern pemerintah yaitu untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Adanya pengendalian dalam setiap aktivitas pelaporan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan sehingga dapat menjadi jaminan terlaksananya proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Herawati,2014; Aditya & Surjono,2017; Bangsa,2018). Namun Mokoginta, Lambey, & Pontoh (2017) menemukan adanya berpengaruh negatif sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah karena dalam praktiknya belum efektif dan efisien. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mampu

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Mokoginta, Lambey, & Pontoh,2017) karena pegawai bagian akuntansi sudah memahami prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan. Begitupun dengan sitem akuntansi pemerintah daerah, menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan seperti diungkap Pujanira & Taman (2017).

Pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wujud bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan manajemen pemerintahan (Mardiasmo, 2018). Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berada di Provinsi Sumatera Selatan selama 7 tahun terakhir (tahun 2013-2019) sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (<http://www.bpkp.go.id>). Representasi opini WTP dari BPK ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah sudah memiliki kualitas laporan keuangan yang sangat baik dan tepat waktu menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah baik. Perolehan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Musi Banyuasin secara konsisten berturut-turut menjadi perhatian untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian ini mengembangkan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya dengan memasukkan variabel kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan dan dampaknya terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan?. Apakah kualitas laporan keuangan mampu memediasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan.

2.TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua pemanfaatan sumber daya, integritas keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan yang

berlaku yang diamanahkan kepada pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menunjukkan proses terintegral yang dilakukan secara terus menerus oleh untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, andal, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan kualitas informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai rangkaian sistematis mulai prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi pada lingkungan organisasi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditujukan sebagai alat pencegah terjadinya penyimpangan anggaran dari pemborosan dan ketidakefisienan, sebagai alat untuk mengantisipasi kehilangan aset, mendorong ketaatan dalam pengelolaan keuangan daerah (Sari,2012). Penerapan pengendalian secara efektif akan mendorong penyusunan laporan keuangan benar-benar dibuat berkualitas. Implementasi pengendalian intern oleh aparat sesuai dengan tupoksi mereka secara efektif dan efisien dan mengikuti program yang sudah direncanakan, sehingga dengan adanya pengendalian intern dapat mendorong kualitas laporan keuangan, maka diajukan hipotesis berikut:

H1: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang mumpuni dan handal agar berguba untuk pengambilan keputusan. embuatan keputusan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik menjadi kunci utama untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas (Ratifah & Ridwan,2014) bahwa dimensi-dimensi sistem akuntansi keuangan

daerah harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah. Semakin baik sistem akuntansi keuangan suatu daerah maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Defitri,2018). Maka dapat dibuat hipotesis penelitian:

H2: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern pemerintah menunjukkan bagaimana proses penyelenggaraan pengelolaan laporan keuangan bisa sesuai dengan peraturan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas (Arfiansyah,2020). Pemerintah daerah harus menjalankan proses yang da dalam rangkaian pengendalian intern, baik dalam proses penyusunan laporan keuangan secara efisien dan efektif, proses pelaporan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset negara serta taat terhadap peraturan dan perundang-undangan. Pengendalian intern meliputi proses penciptaan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, komunikasi efektif, otorisasi transaksi dan pemantauan dan pengawasan, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan.

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kurniawati,2016; Hehanussa,2015). Penyajian laporan keuangan yang baik menjadi faktor penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Seperti juga diungkap Ridzal (2020) bahwa akuntansi sektor publik berperan aktif untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan

Sistem akuntansi yang berkualitas dirancang oleh pemerintah daerah untuk memudahkan jalannya tugas dan percepatan dalam pelaporan keuangan. Suatu sistem akan berkualitas bila bagian saling terintegrasi sesuai dengan tupoksi masing-masing bagian. Semakin baik pemerintah, mengelola sistem akuntansi maka akuntabilitas pengelolaan akan semakin meningkat. Sistem akuntansi hendaknya dirancang untuk memudahkan aplikasi pencatatan hingga pelaporan keuangan sampai memuat laporan keuangan yang akuntabel. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah maka pengelolaan keuangan daerahnya akan semakin akuntabel (Superdi,2017; Suprihastini dkk,2017; Antika, Murdayanti,& Nasution,2020; Dewata dkk,2020). Maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H5: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan yang Dimediasi Oleh Kualitas Laporan Keuangan.

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah untuk menciptakan kegiatan yang efektif dan efisien dan pelaporan keuangan berkualitas akan membantu terwujudnya pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap publik, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan capaian kinerja pemerintah kepada publik. Oleh karena itu akuntabilitas publik sangat diperlukan untuk merealisasikan hasil penerapan sistem pengendalian intern demi terwujudnya kinerja yang maksimal. Diduga bahwa kualitas laporan keuangan dapat memediasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan. dimana adanya pelaporan keuangan yang andal dan valid, terpublikasi, diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan terlebih dahulu maka selanjutnya dapat terlaksana akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan

maksimal. Atas dasar tersebut, maka peneliti mmengajukan hipotesis 6a dan 6b, yakni:

H6a:Kualitas laporan keuangan memediasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah.

H6b:Kualitas laporan keuangan memediasi pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah.

3.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan cara meneliti sampel tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan populasi yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjumlah 52 OPD di Kabupaten Musi yang terdiri dari 22 Dinas, 11 Badan, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan 15 Kecamatan. Teknik penarikan sampel menggunakan Purposive sampling dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:133) yaitu 1) Pegawai yang bekerja dibidang keuangan/akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin; 2) Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pada OPD Kabupaten Musi Banyuasin. Diperoleh sebanyak 96 orang pada OPD di Kabupaten Musi Banyuasin. Variabel dalam penelitian ini dijabarkan berikut ini:

**Tabel 1
Operasional Variabel**

Jenis Variabel/Dimensi	Indikator
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z)	1. Bekerja berdasarkan berpedoman yang telah ada
	2. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum	3. Dipertanggungjawabkan
	4. Informasi yang dihasilkan telah digambarkan dengan jujur.
2. Akuntabilitas Proses.	5. Dilakukan secara cepat, tepat dan terbuka.
3. Akuntabilitas Program.	6. Keterbukaan ruang akses yang memadai.
4. Akuntabilitas Kebijakan	7. Laporan keuangan menjadi tolak ukur dalam
Mardiasmo,2018:28	penyusunan anggaran tahun berikutnya.
	8. Monitoring dan evaluasi

<p>Kualitas Laporan Keuangan (Y)</p> <p>1. Relevan</p> <p>2. Andal</p> <p>3. Dapat dibandingkan</p> <p>4. Dapat dipahami</p> <p>PP No. 71 Tahun 2010</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki manfaat umpan balik (<i>feedback value</i>) 2. Memiliki manfaat prediktif (<i>predictive value</i>) 3. Tepat waktu 4. Lengkap. 5. Penyajian jujur 6. Dapat diverifikasi 7. Netralitas. 8. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 9. Batas pemahaman para pengguna.
<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X1)</p> <p>1. Lingkungan Pengendalian</p> <p>2. Penilaian Resiko</p> <p>3. Kegiatan Pengendalian</p> <p>4. Informasi dan Komunikasi</p> <p>5. Pemantauan</p> <p>Mahmudi,2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan integritas dan nilai etika 2. Memiliki komitmen terhadap kompetensi 3. Berperilaku dalam kode etik 4. Menerapkan penentuan batas toleransi 5. Pengendalian intern dan manajemen terhadap risiko 6. Otorisasi dari pihak berwenang 7. Pemisahan tugas 8. Pengidentifikasian resiko internal 9. Pengidentifikasian resiko eksternal 10. Penerapan sistem informasi 11. Sistem informasi harus berfungsi dengan baik 12. Pemisahan kewajiban harus diterapkan secara memadai 13. Ada otorisasi atas transaksi dan aktivitas 14. Melakukan pengendalian fisik dan aktiva catatan 15. Ada pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan kegiatan 16. Pemantauan dilakukan secara periodik 17. Menilai kualitas pengendalian internal
<p>Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) (X2)</p> <p>1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan SAP.</p> <p>2. Prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan sistem</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem akuntansi keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah 2. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual 3. Pengakuan transaksi. 4. Melaksanakan prosedur pencatatan anggaran 5. Melaksanakan prosedur belanja/beban 6. Melaksanakan prosedur akuntansi aset 7. Melaksanakan prosedur

<p>akuntansi pemerintah daerah (SAPD) yang berlaku.</p> <p>3. Pembuatan laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik</p> <p>Permendagri No. 64/2013</p>	<p>akuntansi kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Melaksanakan prosedur pendapatan 9. Melaksanakan prosedur jurnal dan penyesuaian 10. Pengakuan pencatatan transaksi. 11. Membuat laporan keuangan setiap priode akuntansi 12. Pelaporan keuangan dilakukan secara periodik 13. Melakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan
---	--

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Teknis analisis dimulai dari pengujian kualitas data berupa Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data, selanjutnya dilakukan Uji Asumsi Klasik, Koefisien Determinasi, dan Analisis Jalur (Path Analysis) dengan bantuan software SPSS. Analisis jalur dimaksudkan menganalisis jalur persamaan manakah yang paling tepat dan efektif jika ada variabel intervening atau langsung berpengaruh pada variabel dependen.

4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data kuesioner, diperoleh data yaitu dari 96 kuesioner yang disebar kepada responden, hanya 79 kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah atau sebesar 82,30% dari total 100% kuesioner yang diperoleh oleh peneliti.

Uji Kualitas Data

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dan indikator dikatakan valid apabila data yang dihasilkan menggambarkan ukuran kenyataan yang sebenarnya, dengan ketentuan bila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dimana $n=30$ dengan tingkat signifikan 5%, nilai dari r_{tabel} sebesar 0,361. Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan bahwa indikator cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Indikator dikatakan tidak reliabel jika koefisien $Alpha$ Cronbach $< 0,6$, sedangkan Cronbach $Alpha$ 0,70 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Berikut tabel 2 menampilkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas.

Tabel 2
Hasil Uji Kualitas Data

Variabel	Validitas		Reliabilitas	Ket
	Indikator	R hitung	Cronbach's Alpha	
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	SPIP1-SPIP17	0,455-0,722	0,916	Valid dan Reliabel
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	SAPDSA PD13	0,365-0,670	0,860	Valid dan Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	KLK1-KLK9	0,370-0,800	0,865	Valid dan Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	APKD1-APKD8	0,491-0,621	0,848	Valid dan Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2021

Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi 1

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa hasil uji t dan Uji F untuk mengetahui apakah variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dilihat dari nilai t hitung dan tingkat sinifikansi. Tabel 3 juga menjelaskan nilai *Adjusted R Square* 0,059, artinya angka 5,9% menunjukkan variasi dari variabel Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya 94,1%, dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 3
Hasil Regresi 1

Model	Standardized Coefficients (B)	t	Sig.
(Constant)		0.812	0.419
SPIP	0.273	2.472	0.016
SAPD	0.071	0.648	0.519
Adjusted R Square	0.059		
F	3.450		
Sig.	0.037		

Sumber: Output SPSS diolah, 2021

- a. Predictors: (Constant), SPIP=Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SAPD=Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- b. Dependent Variable: KLK=Kualitas Laporan Keuangan

Hasil Uji Regresi 2

Dari tabel 4 dapat dilihat hasil uji t dan Uji F dan nilai *Adjusted R Square* 0,402, artinya ada 40,2% variasi dari variabel Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan sisanya 59,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

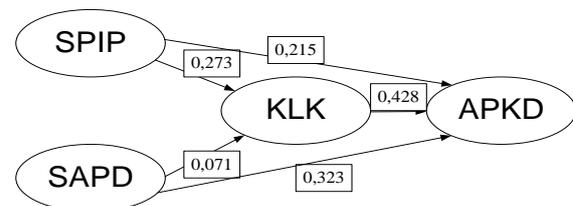
Tabel 4
Hasil Regresi 2

Model	Standardized Coefficients (B)	t	Sig.
(Constant)		-1.255	0.213
SPIP	0.215	2.356	0.021
SAPD	0.323	3.666	0.000
KLK	0.428	4.677	0.000
Adjusted R Square	0.402		
F	18.508		
Sig.	0.000		

Sumber: Output SPSS diolah, 2021

- a. Predictors: (Constant), KLK=Kualitas Laporan Keuangan, SAPD=Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, SPIP=Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan

Selanjutnya hasil analisis jalur dapat dijelaskan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Model Persamaan Jalur

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil regresi linier berganda (tabel 3) menunjukkan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai t hitung sebesar 2,472 > nilai t tabel sebesar 1,992 dengan nilai probabilitas 0,016 yang berarti lebih kecil dari 0,05, ini berarti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan begitu, dapat disimpulkan H1 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan

Pengendalian Intern khususnya lingkungan pengendalian akan meningkatkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Temuan ini mengindikasikan sistem pengendalian pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah baik, berfungsi sebagai pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran, pemborosan, ketidakefisienan, seperti dinyatakan Sari (2012). Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Herawati (2014), Aditya & Surjono (2017), dan Bangsa (2018), namun bertentangan dengan hasil Mokoginta, Lambey, & Pontoh (2017) yang menyatakan berpengaruh negatif sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah karena dalam praktiknya belum efektif dan efisien

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil regresi linier berganda (tabel 3) menunjukkan variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki nilai t hitung sebesar 2,356 < nilai t tabel sebesar 1,992 dengan nilai probabilitas 0,519 yang berarti lebih besar dari 0,05, ini berarti Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan begitu, dapat disimpulkan H2 ditolak. Hal ini jika dicermati tidak semua Badan dan Dinas pada OPD Kabupaten Musi Banyuasin yang mampu menjalankan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Jika dilihat dari skor rata-rata indikator yang paling kecil yaitu pada proses pembuatan laporan keuangan secara periodik, sumber daya yang masih belum mumpuni dalam menjalankan sistem secara efektif dan efisien mungkin menjadi penyebab mengapa sistem akuntansi pemerintah daerah belum mampu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ratifah & Ridwan (2014) dan Defitri (2018).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan

Pada hasil regresi tabel 3, memperlihatkan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai t hitung sebesar 2,472 > nilai t tabel sebesar 1,992

dengan nilai probabilitas 0,021 yang berarti lebih kecil dari 0,05, ini berarti H3 diterima, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah sudah berjalan sesuai peraturan mulai dari proses penyusunan sampai pelaporan pengelolaan keuangan, ditunjukkan dengan skor rata-rata indikator tertinggi dimiliki oleh indikator lingkungan pengendalian. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sabriani & Rahayu (2020), Mansyuer & Efendi (2020) dan Hardiningsih dkk (2019).

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan

Tabel 3 menunjukkan nilai variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai t hitung sebesar 4,677 > nilai t tabel sebesar 1,992 dengan nilai probabilitas 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, ini berarti H4 diterima, bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, seperti pendapat Kurniawati (2016) dan Hehanussa (2015). Hasil temuan ini menyatakan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang andal yaitu telah memuat informasi secara jujur dan wajar, juga memenuhi karakteristik dapat dibandingkan yaitu informasi sudah disajikan dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Memenuhi karakteristik dapat dipahami yaitu pengguna dapat memahami seluruh informasi yang tersaji dalam laporan keuangan.

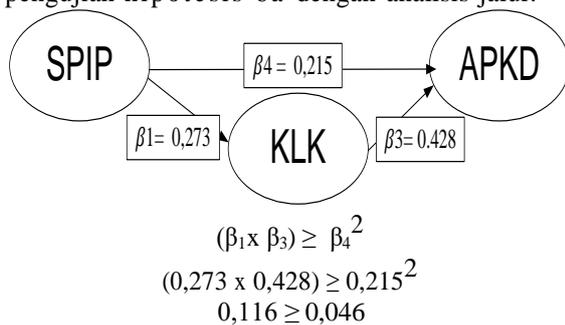
Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan

Hasil regresi pada tabel 3 juga merangkum nilai variabel **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang** memiliki nilai t hitung sebesar 3,666 > nilai t tabel sebesar 1,992 dengan nilai probabilitas 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, ini berarti H5 diterima. Bahwa Sistem akuntansi yang dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah terintegrasi sehingga mampu mengelola sistem akuntansi tepat waktu dan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan menjadi cepat dan tepat.

Hasil penelitian ini mendukung (Superdi,2017; Suprihastini dkk,2017; Dewata,2020; Antika, Murdayan ti,& Nasution,2020). Hasil perhitungan skor rata-rata, indikator tertinggi yaitu pada prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berlaku, ini jelas membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem mulai dari proses pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan.

Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan yang Dimediasi Oleh Kualitas Laporan Keuangan.

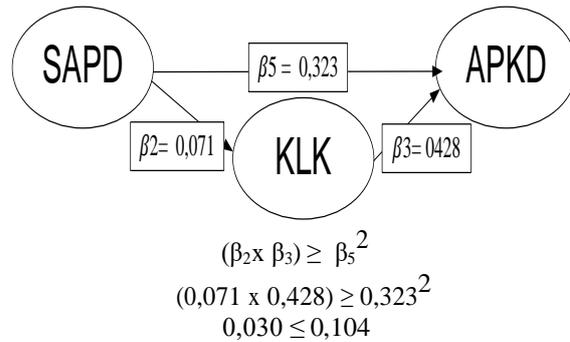
Gambar 2 berikut ini menunjukkan hasil pengujian hipotesis 6a dengan analisis jalur.



Gambar 2 Hasil Perhitungan analisis jalur untuk hipotesis 6a.

Berdasarkan gambar 2 diperoleh hasil 0,116 yang nilainya lebih besar dari nilai standardize coefficient Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ke Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (β_4) sebesar 0,046. Ini dapat diartikan hipotesis 6a diterima, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan. Implikasi penelitian ini bagi pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu agar terus kontinu dan konsisten meningkatkan pengendalian intern dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pengarah dan pengawasan harus terus dilakukan dalam rangka perbaikan atas hasil pemeriksaan dan temuan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi.

Selanjutnya pengujian dengan analisis jalur untuk hipotesis 6b, seperti gambar 3 berikut ini.



Gambar 3 Hasil Perhitungan analisis jalur untuk hipotesis 6b

Berdasarkan gambar 3, diperoleh hasil 0,030 yang nilainya lebih kecil dari nilai standardize coefficient Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ke Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (β_5) sebesar 0,323, ini berarti hipotesis 6b ditolak, bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini berimplikasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan, konsisten dan berkomitmen dalam memahami dan aplikatif dalam menjalankan sistem akuntansi pemerintah daerah agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akurat. Perlu adanya pendidikan lanjut bagi pegawai ataupun dan pelatihan mengingat dinamisnya perkembangan standar dan peraturan akuntansi di lingkungan sektor pemerintahan.

5.SIMPULAN

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sebaliknya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,059, artinya kontribusi sebesar 5,9% variasi dari variabel Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
2. Kualitas Laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan, dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,402, artinya kontribusi sebesar 40,2% variasi dari variabel Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kualitas laporan Keuangan.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan.

6.DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Sikap*, 2(1), 49-62.
- Antika, Zeny, Yunika Murdayanti, dan Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212-232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Bangsa, I. N. (2018). The effect of internal control systems, accounting systems on the quality of financial statements moderated by organizational commitments. *Accounting Analysis Journal*, 7(2), 127-134.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64-75.
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., & Lestari, T.D. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 541-550
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963>
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR–Study & Accounting Research*, 11(1), 1-14.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Edisi empat. Andi. Yogyakarta.
- Hehanussa, Salomi J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Jurnal Ekonomi Vol 2, No 1. Universitas Sultan Agung*. <http://www.bpkp.go.id>
- Kurniawati, M., & Hesti, M. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember).
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik (Cetakan Pertama). Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta
- Mansyuer, T. Y., & Efendi, D. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Nogueira, S. P., dan Jorge, S. M., 2017, The Perceived Usefulness Of Financial Information For Decision-Making In Portuguese Municipalities: The Importance Of Internal Control, *Journal of Applied Accounting Research*, Vol 18, No. 1, Februari: 116-136
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2014). Komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap

- Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika Journal*, 11(1), 29-39.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87-97.
- Sabriani, A. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 14-23.
- Sari, M. A. O. D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 186-193.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan; Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; (studi empiris pada satuan kerja; perangkat daerah Kabupaten Sijunjung) Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. *JOM Fekon*, 4(1).
- Suprihastini, E., Akram, & Santoso, B. (2017). Effect of Regional Financial Accounting System, Internal Control Systems and Regional Financial Audit on Financial Accountability of Local Government. *International Conference and Call for Papers*, Jember, 830–852
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28.
- Warren, Carl S, James M. Reeve, Philip E. Fess. (2005). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, W. K., 2015, Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik, *Jurnal*
- Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 19, No. 1, Mei: 3-15.